

**PERLIAMENTARY THRESHOLD DAN PRESIDENTIAL  
THRESHOLD DI INDONESIA DALAM  
KONSEP DEMOKRASI**

**SKRIPSI**



Oleh :

**PUTRI RUMMANA HUMAIRO**

**NBI : 1311800108**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA  
2023**



**PERLIAMINARY THRESHOLD DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD  
DI INDONESIA DALAM KONSEP DEMOKRASI**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Putri Rummana Humairo**

**NBI : 1311800108**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERLIAMANTARY THRESHOLD DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI**  
**INDONESIA DALAM KONSEP DEMOKRASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat**  
**Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh  
**Putri Rummana Humairo**

**NIM : 1311800108**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie S.H., M.H.**

**NPP/NIP : 20310210845**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**



**PERLIAMETARY THRESHOLD DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI  
INDONESIA DALAM KONSEP DEMOKRASI**

**OLEH :**

**PUTRI RUMANA HUMAIRO**

**NIM : 1311800108**

**Telah di pertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 6  
Januari 2023 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.1426/ST/FH/XII/2022  
Tanggal: 6 januari 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie S.H., M.H.** .....

**NPP/NIP : 20310210845**

**Sekretaris : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.** .....

**NPP/NIP : 20310130612**

**Anggota : Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.** .....

**NPP/NIP : 20310160711**

**Mengetahui**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan.**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang Bertanda tangan di Bawah ini:

Nama : PUTRI RUMMANA HUMAIRO  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal

### ***PERLIAMENTARY THRESHOLD DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM KONSEP DEMOKRASI***

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Putri Rummana Humairo

NIM : 1311800108



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUTRI RUMMANA HUMAIRO  
Progam Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum  
Magnum Opus Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### ***PERLIAMENTARY THRESHOLD DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM KONSEP DEMOKRASI***

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar  
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Putri Rummana Humairo  
NIM : 1311800108

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang Bertanda tangan di Bawah ini:

Nama : PUTRI RUMMANA HUMAIRO  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

### ***PERLIAMENTARY THRESHOLD DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM KONSEP DEMOKRASI***

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) di batalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya, 10 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Putri Rummana Humairo

NIM : 1311800108

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang Bertanda tangan di Bawah ini:

Nama : PUTRI RUMMANA HUMAIRO  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : HUKUM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

***PERLIAMENTARY THRESHOLD DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DI  
INDONESIA DALAM KONSEP DEMOKRASI***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,



Putri Rummana Humairo  
NIM : 1311800108



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, Rabb semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmatNya. Maha Suci Allah yang telah memudahkan segala urusan. Berkat kasih sayangNya-lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya, bapak Moch.Maksum,Sos (alm) dan ibu Enik Kuswati, yang selalu mendoakan saya dan selalu berjuang untuk saya.
3. Adik sepupu saya Heni yang selalu menyemangati saya.
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.,CMC., selaku dekan fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi.,SH., MH. selaku Kepala Progam Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Dr.Ahmad Sholikin Ruslie,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan memberikan banyak solusi atas setiap permasalahan atau kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tommy Michael, S.H.,M.H selaku dosen wali yang selama ini telah membimbing saya dalam perkuliahan saya Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
8. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan

Surabaya, 10 Januari 2023

  
Putri Rummana Humairo

NIM : 1311800108

## **ABSTRACT**

*General elections must be carried out in a more qualified manner from time to time. At present, because elections are an element of democracy that has become a concrete form, the involvement of the people and their defeat in choosing or being elected as representatives legislative as well as leaders in the executive. Parliamentary Threshold & Presidential Threshold is a mechanism in the democratic party in Indonesia which in this case has. The frenzy on the democracy index is questionable with the issues it takes in this research, is the Parliamentary Threshold & Presidential Threshold in accordance with Democracy Perspective and Is the Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XIX/2021 a form of Human rights violations based on Article 43 of Law Number 30 of 1999 concerning Human Rights Human. The problem approach to answering these legal issues is the Approach Legislation (statute approach), is an approach using legislation and regulations. Conceptual approach (conceptual approach) is used to study and analyze the framework, conceptual framework or theoretical foundation of the legal issues that will be studied, from this approach the researcher can use an analytical knife in searching answers to legal issues from writing this thesis. Based on the analysis of legal materials carried out, it is concluded that the Limits Parliamentary Threshold & Presidential Threshold in Indonesia is a form democracy in the multiparty system that exists in Indonesia as the content of democracy on community participation in the general election process to determine figures and direction of quality government leadership.*

*Keywords Parliamentary Threshold & Presidential Threshold, Democracy.*



## ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu, kaerenanya pemilu merupakan unsur demokrasi yang menjadi bentuk kongkret keterlibatan rakyat dan akan kedaulatannya memilih atau dipilih sebagai seorang perwakilan legislative maupun pemimpin di eksekutif. *Parliamentary Threshold & Presidietial Threshold* merupakan mekanisme dalam pesta demokrasi di Indonesia yang dalam hal ini memiliki perdebatan pada indeks demokrasi yang di pertanyakan dengan isu yang diambil dalam penelitian ini, *Parliamentary Threshold & Presidietial Threshold* dengan Konsep Demokrasi dan Putusan MK No 48/PUU-XIX/2021 bentuk Pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Hak Asasi Manusia Adapun pendekatan masalah untuk menjawab isu hukum tersebut adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis *legal issue* yang akan diteliti, dari pendekatan ini peneliti dapat menggunakan pisau analisis dalam mencari jawaban atas isu hukum dari penulisan skripsi ini. Berdasarkan analisis bahan hukum yang dilakukan, diperoleh simpulan bahwa Batas Parlemen *Perliamentary Threshold & Presidential Threshold* di Indonesia merupakan bentuk demokrasi dalam sistem multipartai yang ada di Indonesia yang sebagai muatan demokrasi atas partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum untuk ikut menentukan perwakilan dan arah kepemimpinan pemerintahan yang berkualitas.

Kata Kunci : *Parliamentary Threshold & Presidietial Threshold, Demokrasi,*

## DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
1.5.5 Analisis Bahan Hukum.....	8
1.5.6 Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II</b> .....	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1. Konsep Konstitusi .....	11
2.2. Konsep Parliamentary Threshold .....	14
2.3. Konsep <i>Presidential Threshold</i> .....	16
2.4 Konsep HAM .....	19
2.5 Konsep Demokrasi .....	20
<b>BAB III</b> .....	<b>25</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>25</b>
3.1 Parliamentary threshold & Presidetial Threshold di Indonesia.....	25
3.1.1 Pembatasan Parlemen dalam sistem Presidential .....	25
3.1.2 Parliamentary threshold & Presidetial Threshold Konsep Demokrasi.....	34
3.1.3 Pengaruh Penerapan <i>Parliamentary threshold</i> dalam Pemilu Legislatif terhadap Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.....	36
3.2 Parlementary Threshold Berdasarkan Putusan MK No 48/PUU-XIX/2021.....	45
3.2.1 Dasar Pertimbangan Penerapan Parlementary Threshold .....	45



3.2.2 Hak Asasi Manusia.....	66
3.2.3 Hak Asasi Manusia Menurut Undang-undang 30 Tahun 1999 .....	69
3.2.4 Hak Asasi Manusia dan Pemilu.....	73
<b>BAB IV .....</b>	<b>77</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>